



RANKHIR RENJA TAHUN 2021

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Landasan Hukum	2
	Maksud dan Tujuan	3
	Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...	5
	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	5
	Isu Isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi SKPD	6
	Tinjauan terhadap Sinergitas Program	6
	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi	7
	Formulasi Isu - Isu Penting dan Catatan Strategis untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas yang direncanakan	8
	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	9
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	10
	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	16
	Program dan kegiatan	22
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	27
BAB V	PENUTUP	2

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada Kami untuk dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Penyusunan Renja adalah suatu keharusan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh OPD pada satu tahun kedepan. Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Bengkalis, Agustus 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKALIS,**

Drs. H. RAJA ARLINGGA

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199303 1 226

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan , Pelaporan dan Evaluasi menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam rencana kerja masing-masing SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan setiap tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 juga merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan prioritas, merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indicator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 akan dijadikan landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode tahun 2016-2021. Disamping itu, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terintegrasi

dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2021, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Riau, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 memperhatikan arah dan garis kebijakan yang telah di rumuskan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/409/2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai acuan dan tolak ukur dalam pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 yang sesuai tugas, pokok dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

1. Sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada tahun 2021;



2. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja 2021 dan Renstra hingga tahun 2021;
3. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan perencanaan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.

a. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renja tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. Penutup

Lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 sebagai Berikut :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 sebesar : **RP. 12.636.263.547,-** adapun dana tersebut adalah Belanja Tidak Langsung **RP.5.506.492.147,-** Belanja Langsung **Rp.7.069.771.400,-** untuk membiayai 2 urusan 8 program dan 38 Kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - Penyediaan Jasa Supir Kantor
 - Publikasi Informasi Pembangunan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pembangunan fasilitas gedung kantor



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kota Layak Anak
 - Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga
 - Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin berkala kendaran dinas operasional
 - Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- pendididkan dan pelatihan informal
 - Capacity Building bagi Aparatur Lingkup SKPD
 - Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Program peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD
5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- Perapan kecamatan ramah anak
 - Penguatan dan pembinan kelembagaan forum anak kabupaten bengkalis dan kecamatan se kabupaten bengkalis
 - Pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan
 - Peningkatan n pengembangan potensi anak
 - Monitoring dan evaluasi kota layak anak (KLA)
 - Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga (sunat massal)
 - Sosialisasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)
6. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Workshop anak berkebutuhan khusus
 - Gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA)



- Peningkatan pengetahuan guru dan orang tua dalam pemenuhan hak anak
 - Penerapan sekolah ramah anak
 - Penerapan pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan
 - TOT konvensi hak anak
 - Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
 - Bimtek pelapor dan pelopor bagi forum anak
 - Sosialisasi dan fasilitas embentukan APSAI
 - Pembentukan dan penguatan SATGAS perlindungan perempuan dan anak
 - Pelatihan peningkat SDM dan kebugaran bagi lansia
 - Pelatihan P2MBG bagi organisasi masyarakat dunia usaha
 - Peningkatan potensi kelompok perempuan pesisir kecamatan rupa dan rupa utara
 - Pembinaan kecamatan sayang ibu
 - Peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga
 - Peningkatan kapasitas organisasi perempuan
7. Program peningkatan kualitas hidup dn perlindungan perempuan
- Pelatihan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi
 - Rapat koordinasi perlindungan perempuan dan anak tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
 - Penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten bengkalis
 - Pemberdayaan perempuan keluarga nelayan dalam pemanfaatan potensi lokal
 - Whorkshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga
 - Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah
 - Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)
 - Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)
 - Penguatan dan pembinaan forum komunikasi perempuan penyandang disabilitas



- Capacity building bagi pengurus P2TP2A ,TPPO,Satgas dan Relawan peduli perempuan dan anak
 - Fasilitas pengembangan model desa prima
 - Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan putus sekolah melalui kursus dan praktek magang di kabupaten bengkalis
 - Pengembangan strategi edukasi masyarakat melalui komunikasi dan edukasi (KIE) dan kearifan lokal
 - Pelaksanaan pernikahan massal
 - Pendidikan dan pelatihan pengasuh anak (Baby Sister)
 - Fasilitas pencegahan pernikahan usia dini
8. Program pengikatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Pemutakhiran data dan profile gender
 - Penguatan kapasitas diri bagi warga lapas perempuan
 - Sosialisasi strategi PUG bagi tenaga pendidik SLTP dan SLTA
 - Penguatan mental spritual bagi calon ayah daan ibu muda
 - Pelatihan perempuan berpolitik

Dari kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Tri Wulan IV yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat ddiuraikan sebagai berikut :

1. Dari realisasi fisik kegiatan mencapai 100 % sedangkan kan
2. Untuk realisasi keuangan 88,95 %

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2021			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016 s.d 2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg di Evaluasi (2019)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.
1	0102 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.																											
1	0102 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Surat Masuk yang Keluar yang di Layani Dalam 1 Tahun.	19.000	500.250.000,00	6.600	132.600.000,00	3.800	96.000.000,00	950	16.000.000,00	950	23.999.000,00	950	27.866.000,00	950	21.933.000,00	3.800	89.598.000,00	100,00	93,33	10,400	222.198.000,00	54,74	44,42	DPP & PA			
2	0102 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di	60	1.696.250.000,00	24	197.231.369,00	12	318.500.000,00	3	25.318.279,00	3	28.793.743,00	3	27.926.819,00	3	83.091.915,00	12	165.130.756,00	100,00	51,85	36	362.362.125,00	60,00	21,36	DPP & PA			
3	0102 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun.	45	119.025.000,00	15	28.159.555,00	9	21.500.000,00			3	2.981.970,00	3	6.974.750,00	3	1.008.000,00	9	10.965.720,00	100,00	51,00	24	39.125.275,00	53,33	32,87	DPP & PA			
4	0102 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Jumlah Peralasan dan Bahan Kebersihan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun. Jumlah Tenaga Kebersihan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	65	1.670.941.000,00	26	464.650.300,00	13	333.284.200,00																				
5	0102 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun.	95	1.035.000.000,00	182	163.605.226,00	95	168.303.000,00	24	24.817.700,00	24	39.667.000,00	24	29.535.900,00	23	74.011.100,00	95	168.031.700,00	100,00	99,84	277	331.636.926,00	291,58	32,04	DPP & PA			
6	0102 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.	60	322.000.000,00	21	63.888.410,00	12	36.213.700,00	3	4.176.350,00	3	7.833.200,00	3	7.491.500,00	3	15.530.000,00	12	35.031.050,00	100,00	99,48	33	98.919.460,00	55,00	30,72	DPP & PA			
7	0102 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.	50	370.300.000,00	23	47.365.900,00	10	39.109.400,00	3	12.789.800,00	3	6.872.300,00	2	10.402.400,00	2	9.022.000,00	10	39.086.500,00	100,00	99,94	33	86.452.400,00	66,00	23,35	DPP & PA			
8	0102 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralasan Perundang Undangan.	Jumlah Bahan Bacaan dan Penggandaan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	100	115.000.000,00	40	36.880.000,00	20	23.000.000,00	5	650.000,00	5	6.268.000,00	5	5.712.000,00	5	3.520.000,00	20	16.150.000,00	100,00	70,22	60	53.030.000,00	60,00	46,11	DPP & PA			
9	0102 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	280	431.250.000,00	112	72.170.000,00	56	68.620.000,00																				
10	0102 01 018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah.	Frekuensi Lakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun.	425	3.000.000.000,00	100	607.161.900,00	85	430.694.000,00	21	90.820.000,00	21	82.853.400,00	21	133.463.598,00	22	113.427.589,00	85	430.564.587,00	100,00	99,97	185	1.037.726.487,00	43,53	34,59	DPP & PA			
11	0102 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	45	950.000.000,00	15	291.600.000,00	9	288.000.000,00																				
12	0102 01 033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor.	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	15	325.000.000,00	5	97.200.000,00	3	57.600.000,00																				
13	0102 01 034	Publikasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	425	345.000.000,00	120	56.500.000,00	85	32.300.000,00																				
													Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	84,27			73,78	36,08									
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah									
2.	0102 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.																											
	0102 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.	15	460.000.000,00	3	59.873.280,00	3	50.450.000,00																				
	0102 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.	25	846.750.000,00	11	89.550.000,00	5	156.000.000,00																				
	0102 02 010	Pengadaan Mebeleur.	Jumlah Jenis Mebeleur yang di Adakan Dalam 1 Tahun.	120	200.000.000,00	38	59.400.000,00	24	40.000.000,00																				
	0102 02 016	Pengadaan Pakaian Olahraga.	Jumlah Pakaian seragam Olahraga yang di Sediakan.	280	160.000.000,00			56	-																				
	0102 02 022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Frekuensi Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun.	60	500.000.000,00	24	105.003.000,00	12	90.000.000,00																				
	0102 02 024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	35	600.000.000,00	16	121.586.300,00	7	107.100.000,00	2	8.919.500,00	2	22.778.000,00	2	17.726.750,00	1	50.100.648,00	7	99.524.898,00	100,00	92,93	23	221.111.198,00	65,71	36,85	DPP & PA			
	0102 02 028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.	62	575.000.000,00	26	82.890.000,00	13	99.000.000,00	4	16.530.000,00	4	8.200.000,00	3	23.090.000,00	2	30.350.000,00	13	78.170.000,00	100,00	78,96	39	161.060.000,00	62,90	28,01	DPP & PA			
	0102 02 050	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor.	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun	30	4.025.000.000,00	12	1.663.951.900,00	6	253.550.000,00																				
													Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	95,01			57,75	36,13									
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah									
3.	0102 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.																											
	0102 05 000	Pendidikan dan Pelatihan Informat.	Jumlah ASN yang di Kiriman untuk Mengikuti Binek dan Diklat Dalam 1 Tahun.	90	862.500.000,00	34	183.740.000,00	18	110.000.000,00	4	8.500.000,00	4	6.600.000,00	5	56.216.600,00	5	32.380.000,00	18	103.696.600,00	100,00	94,27	52	287.436.600,00	57,78	33,33	DPP & PA			
	0102 05 092	Capacity Building Bagi Aparatur Lingkup SKPD.	Jumlah ASN dan Organisasi Perempun yang Mengikuti Best Practice Setiap Tahunnya.	250	3.187.500.000,00	40	232.289.800,00	50	-																				
	0102 05 102	Penyediaan Fasilitas Gedung Kantor.	Frekuensi Dilakukannya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Pada 1 Tahun.	100	575.000.000,00	30	34.270.000,00	20	-																				
													Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	94,27			34,59	15,52									



0102	17	055	Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).	Jumlah Kasus Kekerasan yang di Tangani.	500 Kasus	2.000.000.000,00			100	500.000.000,00	25	19.889.392,00	25	89.565.000,00	25	86.070.000,00	25	257.200.275,00	100	452.724.667,00	100,00	90,54	100	452.724.667,00	20,00	22,64	DPP & PA
0102	17	058	Pengembangan Kreativitas Perempuan Dalam Pemanfaatan Limbah.	Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi Pada Kegiatan Ini.	125 Orang	500.000.000,00			25	211.010.500,00				141.635.500,00	25	67.183.365,00		25	208.818.865,00	100,00	98,96	25	208.818.865,00	20,00	41,76	DPP & PA	
0102	17	059	Pembiayaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pembiayaan.	55 Desa	1.750.000.000,00			11	260.230.000,00			6	110.709.000,00	3	74.375.000,00	2	55.856.000,00	11	240.940.000,00	100,00	92,59	11	240.940.000,00	20,00	13,77	DPP & PA
0102	17	060	Pembiayaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembiayaan dan	250 Kelompok	2.750.000.000,00			50	-								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA	
0102	17	061	Penguatan Forum Komunikasi Perempuan dan Pembiayaan Penyandang Disabilitas.	Jumlah Anggota Forum Komunikasi dan Jumlah Perempuan Penyandang Disabilitas yang Dibina.	50 Orang	1.140.000.000,00			10	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
0102	17	062	Capacity Building Bagi Pengurus P2TP2A, TPPO, Satgas dan Relawan Peduli Perempuan dan Anak.	Jumlah SDM Relawan Peduli Perempuan yang Terlatih.	75 Orang	250.000.000,00			15	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
0102	17	063	Fasilitas Pengembangan Model Desa Prima.	Jumlah Desa yang di Bina.	0 -	-			0	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
0102	17	064	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan Kepala Keluarga dan Putus Sekolah Melalui Kursus.	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mengikuti Kursus.	50 Orang	1.000.000.000,00			10	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
0102	17	065	Pengembangan Strategi Edukasi Masyarakat Melalui Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan Kearifan Lokal.	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi.	250 Kelompok	1.025.000.000,00			50	40.922.600,00				9.352.600,00	50	31.525.000,00		50	40.877.600,00	100,00	99,89	50	40.877.600,00	20,00	3,99	DPP & PA	
0102	17	067	Pendidikan dan Pelatihan Pengasuh Anak (Baby Sister).	Jumlah Perempuan yang di Latih Untuk Menjadi Pengasuh Anak.	90 Orang	250.000.000,00			18	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
0102	17	068	Fasilitas Pencegahan Pernikahan Usia Dini.	Jumlah Anak yang di Berikan Pemahaman tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini.	100 Orang	-			20	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
0102	17	069	Pelaksanaan Pernikahan Massal.	Jumlah Pasangan yang Mengikuti Nikah Massal.	500 Orang	1.366.710.000,00			100	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
																			Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	96,28			34,53	49,99	
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
8.	0102	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.																								
0102	18	037	Pemutakhiran Data dan Profile Gender.	Jumlah Dokumen Profile Gender dan Data Terjilid.	5 Dokumen	1.250.000.000,00			1	148.920.000,00				36.870.000,00			1	84.618.400,00	1	121.488.400,00	100,00	81,58	1	121.488.400,00	20,00	9,72	DPP & PA
0102	18	038	Penguatan Kapasitas Diri Bagi Warga Lapas Perempuan.	Jumlah Warga Lapas yang di Bina Dalam Satu Tahun.	125 Orang	318.750.000,00	25	63.750.000,00	25	-									0	-	0,00	0,00	25	63.750.000,00	20,00	20,00	DPP & PA
0102	18	039	Sosialisasi Strategi PUG Bagi Tenaga Pendidik SLTP dan SLTA.	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengerti Mengerti dan Paham Tentang Strategi PUG.	175 Orang	600.000.000,00			35	118.675.000,00				16.076.000,00	35	82.509.000,00		35	98.585.000,00	100,00	83,07	35	98.585.000,00	20,00	16,43	DPP & PA	
0102	18	40	Penguatan Mental Spiritual Bagi Calon Ayah dan Ibu Muda.	Jumlah Calon Ayah dan Ibu Muda yang Mendapatkan Binaan.	625 Orang	702.205.000,00			125	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
0102	18	41	Pelatihan Perempuan Berpolitik	Jumlah Perempuan yang Berpartisipasi dan Terlibat Dalam Pelatihan Berpolitik.	850 Orang	1.823.850.000,00			170	-									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DPP & PA
																			Rata - Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	82,33			20,00	15,38	
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.915.698.400,00	1.010.476.113,00	1.273.246.586,00	2.043.530.463,00	1.836.234.447,00	6.163.487.609,00												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)																			100,00	90,18			45,33	27,16			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tersedianya SDM serta kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya :																											



Sedangkan untuk tahun berjalan (2020) pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dianggarkan sebesar Rp.12.242.512.077,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.849.897.077,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.392.614.990,- yang terdiri dari 2 urusan 8 program dan 38 Kegiatan.

Dari kegiatan tahun 2020 saat ini sampai dengan triwulan II yang telah dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi fisik kegiatan dengan pencapaian 78, 57 %
2. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar 63,73 %

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:



Tabel. 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2020

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																									
Sasaran Pembangunan Tahunan :																									
KODE	Sasaran RPKD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020		Unit SKPD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			11.430.016.000,00	-	3.915.944.573,00		2.131.805.150,00		382.781.590,00		385.559.063,00						768.340.653,00		4.684.285.226,00		40,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
01.001.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dilyani Dalam 1 Tahun	surat	19000	500.250.000,00	10400	222.198.000,00	3800 Surat	55.057.500,00	950 Surat	4.500.000,00	950 Surat	3.750.000,00	0				1.900,00	8.250.000,00	12.300,00	230.448.000,00	64,74	46,07	
01.002.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 Tahun	bulan	60	1.696.250.000,00	36	362.362.125,00	12 Bulan	309.862.500,00	3 Bulan	57.332.640,00	3 Bulan	58.214.943,00	0				6,00	115.547.583,00	42,00	477.909.708,00	70,00	28,17	
01.006.		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	Unit	45	119.025.000,00	24	39.125.275,00	1 Kegiatan	28.575.750,00	0		0-	2.888.210,00	0					2.888.210,00	24,00	42.013.485,00	53,33	35,30	
01.008.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penalatan dan Bahan Kebersihan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun, Jumlah Tenaga Kebersihan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	orang	65	1.670.941.000,00	39	787.933.900,00	15 Orang / 32 Item	360.000.000,00	0 Orang	108.454.300,00	0 Orang	114.610.000,00	0					223.064.300,00	39,00	1.010.998.200,00	60,00	60,50	
01.010.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 Tahun	item	577	1.035.000.000,00	277	331.636.926,00	95 Item	130.400.000,00	24 Item	11.356.600,00	24 Item	16.673.760,00	0				48,00	28.030.360,00	325,00	359.667.286,00	56,33	34,75	



KODE	Sasaran RKPDP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan anggaran RKPDP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13			15=14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
01.011.		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	item	60	322.000.000,00	33	98.919.460,00	12 Item / 39000 Lembar	69.914.500,00	3 Item	7.890.850,00	3 Item	1.064.000,00	0		0		6,00	8.954.850,00	39,00	107.874.310,00	65,00	33,50	
01.012.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	item	50	370.300.000,00	33	86.452.400,00	10 Item	40.144.900,00	3 Item	7.207.200,00	2 Item	943.400,00	0		0		5,00	8.150.600,00	38,00	94.603.000,00	76,00	25,55	
01.015.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang - Undangan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	Eksemplar	100	115.000.000,00	60	53.030.000,00	1 Tahun	26.450.000,00	0-	5.250.000,00	0-	4.240.500,00	0		0		-	9.490.500,00	60,00	62.520.500,00	60,00	54,37	
01.017.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	orang	280	431.250.000,00	168	129.535.000,00	56 Orang	70.000.000,00	0 Orang	3.540.000,00	0 Orang	15.860.000,00	0		0		-	19.400.000,00	168,00	148.935.000,00	60,00	34,54	
01.018.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah pada 1 Tahun	kali	425	3.000.000.000,00	185	1.037.726.487,00	85 Kali	600.000.000,00	22 Kali	74.000.000,00	21 Kali	57.914.250,00	0		0		43,00	131.914.250,00	228,00	1.169.640.737,00	53,65	38,99	
01.019.		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	orang	45	1.500.000.000,00	24	534.800.000,00	15 Orang	288.000.000,00	0 Orang	76.800.000,00	0 Orang	84.800.000,00	0		0		-	161.600.000,00	24,00	696.400.000,00	53,33	46,43	
01.033.		Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	orang	15	325.000.000,00	8	154.800.000,00	3 Orang	38.400.000,00	0 Orang	9.600.000,00	0 Orang	9.600.000,00	0		0		-	19.200.000,00	8,00	174.000.000,00	53,33	53,54	
01.034.		Publisasi informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	media	425	345.000.000,00	205	77.425.000,00	85 Media	55.000.000,00	22 Media	1.850.000,00	0 Media	-	0		0		22,00	1.850.000,00	227,00	79.275.000,00	53,41	22,98	
01.120.		Penyediaan jasa tenaga administrasi	Jumlah tenaga administrasi kantor yang dipekerjakan	orang	0	-	-	-	3 Orang	60.000.000,00	0 Orang	15.000.000,00	0 Orang	15.000.000,00	0		0		-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	



Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											23,36	15,14	55,79	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	30,29			55,65	36,76				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah				
2.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			7.206.750.000,00	-	2.944.998.798,00		1.338.300.000,00			27.950.000,00		19.289.578,00						47.239.578,00	-	2.992.238.376,00			-	41,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
02.007.		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	unit	15	460.000.000,00	6	110.298.700,00	6 item	189.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00	110.298.700,00	40,00	23,98				
02.009.		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun	Item	25	846.750.000,00	16	244.800.000,00	5 Unit	229.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,00	244.800.000,00	64,00	28,91				
02.010.		Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	Item	120	200.000.000,00	62	97.300.000,00	3 item	53.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,00	97.300.000,00	51,67	48,65				
02.022.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun	Bulan	60	500.000.000,00	36	194.703.000,00	1 Tahun	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	194.703.000,00	60,00	38,94				
02.024.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara Dalam 1 Tahun	unit	35	600.000.000,00	23	221.111.198,00	6 Unit	118.000.000,00	2 Unit	18.500.000,00	2 Unit	16.289.578,00	0	0	0	0	4,00	34.789.578,00	27,00	255.900.776,00	77,14	42,65				
02.028.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional Dalam 1 Tahun	Item	62	575.000.000,00	39	161.060.000,00	13 Item	100.000.000,00	4 Item	9.450.000,00	3 Item	3.000.000,00	0	0	0	7,00	12.450.000,00	46,00	173.510.000,00	74,19	30,16					
02.056.		Pembangunan Fasilitas gedung kantor	Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk 1 Tahun	Item	30	4.025.000.000,00	18	1.915.725.900,00	5 Kegiatan	548.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,00	1.915.725.900,00	60,00	47,60				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											7,14	3,59	24,71	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	5,99			61,00	37,27				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah				
Direksi MONEV - KABUPATEN BENGKULU																												
5.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			4.050.000.000,00	-	287.436.600,00		150.000.000,00		50.000.000,00		(22.987.600,00)							27.012.400,00	-	314.449.000,00			-	7,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
05.001.		Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah ASN yang di Kirimkan untuk Mengikuti BinteK dan Diikut Daiaim 1 Tahun	orang	90	862.500.000,00	62	287.436.600,00	18 Orang	150.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	0 Orang	(22.987.600,00)	0	0	0	0	5,00	27.012.400,00	67,00	314.449.000,00	63,33	36,46				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											34,00	33,33	50,00	(15,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18,01			63,33	36,46				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah				
6.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			786.623.000,00	-	189.598.600,00		218.899.400,00			30.700.000,00		32.700.000,00							63.400.000,00	-	252.998.600,00			-	32,16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
06.027.		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program Dalam 1 Tahun	Dokumen	25	786.623.000,00	17	189.598.600,00	1 Kegiatan	218.899.400,00	0	30.700.000,00	0	32.700.000,00	0	0	0	0	0	0	63.400.000,00	17,00	252.998.600,00	68,00	32,16			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											32,00	14,02	90,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	28,96			68,00	32,16				
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
15.		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			8.823.787.400,00	-	246.608.400,00		1.997.386.600,00			139.513.000,00									139.513.000,00	-	386.121.400,00			-	4,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



15.021.		Pembentukan dan Peningkatan SATGAS Perindungan Perempuan dan Anak	Jumlah satgas PPPA yang mendapatkan pembinaan di kecamatan	Satgas	05	3.817.785.000,00	-	-	11 orang /30 orang	197.061.500,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
15.031.		Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pra-sukasi hari anak	Orang	2500	1.750.000.000,00	700	246.008.400,00	1 Kegiatan	406.540.200,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
RTRM By:MONIEV - KABUPATEN BENGKALIS																				
15.041.		Peningkatan kespedulian penanganan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga	Jumlah anak yang mengikuti surat massal	orang	250	873.004.000,00	-	-	400 orang	439.802.000,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
15.047.		Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten Bengkulu	Jumlah forum anak yang dilatih	Forum	40	1.011.998.400,00	-	-	11 forum	379.360.400,00	0 Forum	34.010.000,00	0 Forum	-	0	-	-	34.010.000,00		
15.050.		Pengembangan dan penciptaan Kota layak anak (KLA)	Jumlah OFD yang terlibat dalam rakor Kota Layak Anak	OFD	60	700.000.000,00	-	-	30 OFD	324.160.400,00	0 OFD	105.503.000,00	0 OFD	-	0	-	-	105.503.000,00		
15.052.		Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA Kabupaten Bengkulu	Jumlah koordinator pembekalan keluarga terlayannya	Orang	0	666.000.000,00	-	-	26 Kotas	250.750.100,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											14,17	6,92	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	6,92
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16.		Program Penguatan Keterbacaan Penguatan Lulusan Gender dan Anak				44.147.192.700,00	-	1.505.377.373,00		3.588.270.700,00		288.857.000,00		(88.025.500,00)				200.831.500,00		
16.046.		Pebalihan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Berwawasan Gender (P2MBEG)	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pebalihan tentang P2MBEG	Kecamatan	11	300.000.000,00	-	-	11 Kecamatan	300.000.000,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
16.062.		Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Perempuan/Organisasi yang mengikuti Peningkatan Hari Ibu	orang	2500	1.025.000.000,00	900	401.201.000,00	400 orang	325.000.000,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
16.066.		Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKCSA)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi GN-AKCSA	orang	500	1.875.000.000,00	100	162.488.100,00	100 orang/4 Kecamatan	251.461.000,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
16.069.		TOT Konvensi Hak Anak	Jumlah Tenaga Pendidican, Tenaga Medis dan Satgas	orang	400	650.000.000,00	130	189.080.500,00	60 orang	163.250.200,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
RTRM By:MONIEV - KABUPATEN BENGKALIS																				
16.087.		Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Kecamatan yang telah mendapatkan penerapan ramah anak di Kabupaten Bengkulu	Kecamatan	15	876.000.000,00	3	162.344.000,00	3 Kecamatan	243.819.700,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
16.089.		Perindungan Anak Tanpa Eksploitasi Masyarakat	Jumlah Pengurus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PAPB) di Kabupaten Bengkulu	Kecamatan	0	1.000.000.000,00	-	-	3 Kecamatan	205.000.100,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
16.096.		Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan organisasi perempuan dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu yang terlatih	Orang	0	5.855.375.000,00	4000	590.197.773,00	1 Kegiatan	732.310.000,00	0	222.724.000,00	0	(113.673.500,00)	0	-	-	109.050.500,00		
16.097.		Penerapan Pukulannya ramah anak yang di bentuk	Jumlah pukulannya ramah anak yang di bentuk	Pukulannya	3	166.717.700,00	-	-	3 Pukulannya	166.717.700,00	0	-	0	0	0	-	-	-		
16.099.		Forum Pokja PUG dan Pelembutan PPRG bagi SKPD di Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kegiatan yang diinisiasi dengan perencanaan responsif Gender	Orang	100	400.000.000,00	-	-	100 Orang	400.000.000,00	0 Orang	86.133.000,00	0 Orang	-	0	-	-	86.133.000,00		
16.100.		Pencabangan dan Evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Bengkulu	Jumlah OFD di Kabupaten Bengkulu yang melaksanakan PPRG dan AERG	Kecamatan	11	250.000.000,00	-	-	11 Kecamatan	250.000.000,00	0	-	0	0	0	-	-	-		



KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2020	Unit SKPD				
								I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					: Tersedianya SDM Serta Kualitas Dokumen Perencanaan dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya					:																		
*) Diisi oleh Kepala Bappeda					Disusun, Bengkalis, - Juli - 2020 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu								Dievaluasi, Bengkalis, - Juli - 2020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu										
					Drs. H. RAJA ARLINGGA Pembina Utama Muda NIP. 19641231 199303 1 226								HADI PRASETYO, ST Pembina Tk. I NIP. 19790520 200502 1 001										
Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS																							



1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kabupaten Bengkalis. Dinas PP-PA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Predikat Kinerja RKPD	Nilai			Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	90,45	92,62	Tinggi	Tinggi	
2	Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%			83	89	92	100	100	100	90,00	88,95	100	100	
3	Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah	%			82	85	90	96	100	100	88,29	100	100	100	
4	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dengan Daerah	%			-	-	-	60	75	93	50	100	100	100	
5	Persentase Daerah yang melaksanakan PPRG	%			0	0	25	35	39	43	75	80	90	95	
6	Jumlah Program Unggulan dengan Jumlah Capaian Program Minimal 60%	Program			-	-	-	4	6	8	4	100	100	100	
7	Predikat Kinerja Akuntabilitas	Nilai			CC	B	C	C	B	B	88,29	87,56	B	B	



6	Persentase Temuan Inspektorat/BPK Yang Ditindaklanjuti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
---	--	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas PP & PA yang pada awalnya mengacu tugas dan kewenangan KPPPA, kebijakan di tingkat nasional untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait sistem perlindungan perempuan dan anak adalah :

No	Isu – isu strategis
1	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang dilakukan laki-laki dan perempuan
2	Belum optimalnya kinerja organisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan
3	Kesenjangan kompetensi SDM aparatur dan sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal
4	Masih adanya kesenjangan gender yang diukur dari pencapaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender (IPG dan IDG)
7	Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) dan rendahnya pengetahuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga serta sulitnya perempuan mengakses permodalan
8	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah maupun masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender di hampir semua aspek kehidupan masyarakat
9	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal
10	Belum sinerginya program perlindungan anak antar sektor terkait

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Intervensi program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan kurang maksimal. Perlu dilakukan suatu intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak yang lebih tinggi.
2. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis



3. Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di kabupaten yang kurang memadai, dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi program prioritas di daerah.
4. Belum tersedianya secara menyeluruh Satuan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.
5. Belum bersinerginya antara Instansi terkait dalam pelaksanaan program Kab/Kota Layak Anak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tercantum pada RKPD 2021;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2021;



5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Adapun tabel Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



Review rancangan akhir RKPD Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
5	Belanja Pegawai			Kab. Bengkalis	Rp 6.172.294.509,00	Belanja Pegawai			Kab. Bengkalis	Rp 6.390.650.474,00
					Rp 6.172.294.509,00					
	BELANJA LANGSUNG									
	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Non Urusan		DPPPA	1 Tahun	2.434.282.350,00					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									2.329.336.800,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	DPPPA	3800	91.994.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	DPPPA	3800	18.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran dan pelayanan prima yang meningkat	DPPPA	12 Bulan	309.862.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran dan pelayanan prima yang meningkat	DPPPA	12 Bulan	309.862.500,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional	DPPPA	1 Kegiatan	29.875.750,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional	DPPPA	1 Kegiatan	29.875.750,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan kantor	DPPPA	32 Item/17 Orang	379.000.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan kantor	DPPPA	32 Item/17 Orang	599.496.100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	DPPPA	95 Item	145.405.300,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	DPPPA	95 Item	100.000.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPA	12 Item / 40000 Lembar	35.246.900,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPA	12 Item / 40000 Lembar	35.246.750,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen listrik	DPPPA	10 Jenis	75.247.900,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen listrik	DPPPA	10 Jenis	49.905.700,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPPPA	1 Kegiatan	26.450.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPPPA	1 Kegiatan	46.450.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat	DPPPA	56 Orang	96.700.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat	DPPPA	56 Orang	90.000.000,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Aparatur SDM yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi ke luar dan dalam daerah	DPPPA	1 Kegiatan	600.000.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Aparatur SDM yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi ke luar dan dalam daerah	DPPPA	1 Kegiatan	500.000.000,00
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah SDM Aparatur yang telah mengikuti koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah antar instansi terkait.	DPPPA	10 Orang	288.000.000,00	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah SDM Aparatur yang telah mengikuti koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah antar instansi terkait.	DPPPA	10 Orang	384.000.000,00
12	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor	DPPPA	3 Orang	38.400.000,00	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor	DPPPA	3 Orang	38.400.000,00
13	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi	DPPPA	85 Media	68.100.000,00	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi	DPPPA	85 Media	68.100.000,00
14	Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan dalam 1 tahun	DPPPA	11 Kecamatan	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan dalam 1 tahun	DPPPA	11 Kecamatan	60.000.000,00



1	2	3	4	5	6					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.136.250.000,00					465.000.000,00
1	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor	DPPPA	5 Pekerjaan	607.550.000,00	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kota Layak Anak	Jumlah Sarana Kota Layak Anak	DPPPA	5 Pekerjaan	700.000.000,00	-	-	-	-	-
3	Pengadaan Pakaian Seragam	Jumlah pakaian seragam	DPPPA	56 orang	120.000.000,00	-	-	-	-	-
4	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor dan UPTD	DPPPA	15 Unit	850.000.000,00	-	-	-	-	-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPA	6 Item	104.450.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPA	6 Item	75.000.000,00
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	DPPPA	5 Unit	402.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	DPPPA	5 Unit	167.000.000,00
7	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelir kantor	DPPPA	3 Item	43.250.000,00	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelir kantor	DPPPA	3 Item	25.000.000,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	DPPPA	1 Kegiatan	100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	DPPPA	1 Kegiatan	50.000.000,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	DPPPA	6 Unit	120.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	DPPPA	6 Unit	88.000.000,00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	DPPPA	1 Kegiatan	89.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	DPPPA	13 Item	60.000.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				550.000.000,00					424.200.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	DPPPA	1 Kegiatan	150.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Informal	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	DPPPA	18 Orang	150.000.000,00
2	Capacity Building bagi Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti capacity building	DPPPA	1 Kegiatan	250.000.000,00	Capacity Building bagi Aparatur Lingkup SKPD	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti capacity building	DPPPA	1 Kegiatan	224.200.000,00
3	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi program	DPPPA	1 Kegiatan	150.000.000,00	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi program	DPPPA	1 Kegiatan	50.000.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				318.839.400,00					251.199.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset SKPD	DPPPA	1 Kegiatan	100.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset SKPD	DPPPA	1 Kegiatan	39.200.000,00
2	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD	DPPPA	1 Kegiatan	218.839.400,00	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD	DPPPA	1 Kegiatan	211.999.000,00
5	Program Pembangunan Daerah				100.000.000,00					-
1	Penyusunan Rensra	Jumlah Dokumen Perencanaan Rensra OPD	DPPPA	1 Kegiatan	100.000.000,00					
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				10.986.724.356,00					
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				1.691.998.406,00					758.744.400,00
1	1. Peningkatan dan pengembangan potensi anak	Jumlah partisipasi anak yang mengikuti puncak hari anak (HAN)	Kab. Bengkalis	500 orang	380.000.000,00	1. Peningkatan dan pengembangan potensi anak	Jumlah partisipasi anak yang mengikuti puncak hari anak (HAN)	Kab. Bengkalis	1 Kegiatan	213.735.700,00



	2	3	4	5	6						
2	2. Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga	Jumlah anak yang menerima bantuan sunatan masal	Kab. Bengkalis	400 orang	500.000.000,00	2. Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga	Jumlah anak yang menerima bantuan sunatan masal	Kab. Bengkalis	50 orang	50.730.000,00	
3	3. Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten Bengkalis	Jumlah Forum Anak Yang Mendapatkan Pembinaan dan Evaluasi	Kab. Bengkalis	16 forum anak	511.998.400,00	3. Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten Bengkalis	Jumlah Forum Anak Yang Mendapatkan Pembinaan dan Evaluasi	Kab. Bengkalis	11 Forum Anak	324.007.000,00	
4	4. Pengembangan dan Percepatan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah OPD yang mengikuti Rakor Kota Layak Anak	Kab. Bengkalis	30 opd	300.000.000,00	4. Pengembangan dan Percepatan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah OPD yang mengikuti Rakor Kota Layak Anak	Kab. Bengkalis	1 Kegiatan	170.271.700,00	
1	2	3	4	5	6						
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					1.632.070.600,00					216.169.900,00
1	1. TOT Konvensi hak anak	Jumlah stake holder yang diberikan TOT pemenuhan hak anak	Kab. Bengkalis	60 orang	200.000.000,00						
2	2. Penerapan sekolah ramah anak	Jumlah sekolah yang menerapkan ramah anak	Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupert, Rupert Utara	200 orang	200.000.000,00	2. Penerapan sekolah ramah anak	Jumlah sekolah yang menerapkan ramah anak	Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupert, Rupert Utara	90 Orang	137.081.000,00	
3	3. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Jumlah masyarakat yang mengikuti workshop perlindungan anak	Bantan, Bathin Solapan, dan Tualang Mandau	150 orang	150.000.000,00	3. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Jumlah masyarakat yang mengikuti workshop perlindungan anak	Bantan, Bathin Solapan, dan Tualang Mandau	3 Kcamatan/ 90 Orang	79.088.900,00	
4	5. Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA Kabupaten Bengkalis	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap PUSPAGA	Kab. Bengkalis	1 puspaga	265.000.000,00	-	-	-	-	-	
5	5. Pencegahan pernikahan Anak	Jumlah orang tua (Suami/istri) yang dilatih untuk mencegah perkawinan dini	Kab. Bengkalis	90 orang	227.155.000,00	-	-	-	-	-	
6	6. Bimtek Pelapor dan Pelopor Bagi Forum Anak	Jumlah Anak yang dilatih sebagai Pelopor dan Pelapor	Kab. Bengkalis	70 orang	199.915.600,00	-	-	-	-	-	
7	7. Monev Puskesmas ramah anak	Jumlah puskesmas yang menerapkan ramah anak	Kab. Bengkalis	33 orang	190.000.000,00	-	-	-	-	-	
8	8. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah informasi yang disampaikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus melalui KIE	Kab. Bengkalis	150 orang	200.000.000,00	-	-	-	-	-	
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan:					3.053.817.100,00					2.454.770.000,00
1	1. Whorshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	Jumlah perempuan dari keluarga nelayan yang dilatih untuk terampil dalam mengolah hasil tangkapan nelayan	Kab. Bengkalis	700 orang	350.000.000,00	1. Whorshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga	Jumlah perempuan dari keluarga nelayan yang dilatih untuk terampil dalam mengolah hasil tangkapan nelayan	Kab. Bengkalis	30 orang	900.000.000,00	
2	2. Pelatihan Keterampilan Penunjang Produktifitas ekonomi perempuan	Jumlah perempuan yang di latih untuk managemen usaha	Kab. Bengkalis	50 orang	389.362.100,00	2. Pelatihan Keterampilan Penunjang Produktifitas ekonomi perempuan	Jumlah perempuan yang di latih untuk managemen usaha	Kab. Bengkalis	50 orang	330.000.000,00	
3	3. Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Jumlah keluarga yang dibina dalam suatu desa	Kab. Bengkalis	264 Orang	120.000.000,00	3. Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)	Jumlah keluarga yang dibina dalam suatu desa	Kab. Bengkalis	264 Orang	450.000.000,00	



4	4. Pembinaan perempuan dan Pembinaan	Jumlah anggota forum komunikasi dan	Kab.	22 orang	305.185.000,00						
5	5. Capacity building bagi Relawan peduli perempuan dan anak	Jumlah pengurus SATGAS, GT-TPPO yang dilatih	Kab. Bengkalis	45 orang	500.000.000,00	5. Capacity building bagi Relawan peduli perempuan dan anak	Jumlah pengurus SATGAS, GT-TPPO yang dilatih	Kab. Bengkalis	45 orang	150.000.000,00	
6	6. Pelaksanaan Pernikahan Massal	Jumlah pasangan yang mengikuti nikah massal	Kab. Bengkalis	75 Pasangan	450.000.000,00	6. Pelaksanaan Pernikahan Massal	Jumlah pasangan yang mengikuti nikah massal	Kab. Bengkalis	15 pasangan	150.000.000,00	
7	7. Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Stake Holder TPPO dan stake holder yang mengikuti rapat	Kab. Bengkalis	55 Orang	110.000.000,00	7. Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Stake Holder TPPO dan stake holder yang mengikuti rapat	Kab. Bengkalis	40 orang	75.000.000,00	
8	8. Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus yang ditangani, jumlah korban dan pelaku yang mendapatkan pendampingan	Kab. Bengkalis	100 kasus	399.770.000,00	8. Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus yang ditangani, jumlah korban dan pelaku yang mendapatkan pendampingan	Kab. Bengkalis	100 kasus	399.770.000,00	
9	9. Bimbingan dan Penyuluhan Pencegahan kekerasan Dalam Rumah Tangga se Kabupaten Bengkalis	Jumlah kebijakan yang disusun oleh desa / kelurahan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kab. Bengkalis	440 orang	287.700.000,00	-	-	-	-	-	
10	10. Penguatan Kelembagaan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi	11 Kecamatan	11 kecamatan	141.800.000,00	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				4.608.838.250,00					1.277.317.494,00	
1	Pengembangan Kreatifitas Perempuan dalam Pemanfaatan Limbah	Jumlah Perempuan Petani Yang Dilatih Dalam Pemanfaatan Limbah	Kab. Bengkalis	50 Orang	234.545.250,00	Pengembangan Kreatifitas Perempuan dalam Pemanfaatan Limbah	Jumlah Perempuan Petani Yang Dilatih Dalam Pemanfaatan Limbah	Kab. Bengkalis	15 orang	100.000.000,00	
2	Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah Perempuan Lansia yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bengkalis	20 orang	199.648.000,00	Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Lanjut Usia (Lansia)	Jumlah Perempuan Lansia yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bengkalis	20 orang	75.000.000,00	
3	Pelatihan Mediasi Bersertifikat	Jumlah Perempuan Lansia yang mendapatkan perlindungan	Kab. Bengkalis	5 orang	172.960.000,00	Pelatihan Mediasi Bersertifikat	Jumlah Perempuan Lansia yang mendapatkan perlindungan	Kab. Bengkalis	2 orang	78.164.000,00	
4	Pengembangan Model Desa Prima	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bengkalis	30 orang	200.000.000,00	-	-	-	-	-	
5	Pendataan dan Pembinaan Dasa Wisma	Jumlah keluarga yang dibina dalam persiapan menuju keluarga berkualitas	Kab. Bengkalis	330 orang	415.785.000,00	-	-	-	-	-	
6	Pelatihan Pra Keluarga Persiapan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang dibina dalam persiapan menuju keluarga berkualitas	Kab. Bengkalis	550 orang	350.000.000,00	-	-	-	-	-	
7	Pelatihan dan keterampilan pendidikan untuk pengasuh anak dan lansia	Jumlah Perempuan yang dilatih dalam pengasuhan anak dan lansia	Kab. Bengkalis	50 Orang	186.900.000,00	-	-	-	-	-	
8	Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Kepala Keluarga dan Putus Sekolah Melalui Kursus dan Praktek Magang	Jumlah Janda dan Perempuan yang Putus Sekolah yang Mendapat Pelatihan	Kab. Bengkalis	25 Orang	250.000.000,00	Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Kepala Keluarga dan Putus Sekolah Melalui Kursus dan Praktek Magang	Jumlah Janda dan Perempuan yang Putus Sekolah yang Mendapat Pelatihan	Kab. Bengkalis	12 orang	100.000.000,00	
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	Jumlah OPD dan Kecamatan yang telah melaksanakan PPRG dan ARG	Kab. Bengkalis	11 Kecamatan	249.000.000,00	-	-	-	-	-	



10	Pelatihan P2MBG Bagi Aparatur Kecamatan, Organisasi, Masyarakat, dan Dunia Usaha	Terlatihnya aparatur kecamatan, anggota organisasi masyarakat dan dunia usaha tentang perencanaan berwawasan gender	Kab. Bengkulu	11 Kecamatan	300.000.000,00	Pelatihan P2MBG Bagi Aparatur Kecamatan, Organisasi, Masyarakat, dan Dunia Usaha	Terlatihnya aparatur kecamatan, anggota organisasi masyarakat dan dunia usaha tentang perencanaan berwawasan gender	Kab. Bengkulu	7 Kecamatan	192.268.875,00
11	Peningkatan potensi perempuan pesisir kecamatan rupa dan rupa utara	Jumlah usaha rumput laut dan olahan ikan di rupa dan rupa utara	2 Kecamatan	2 Kecamatan	350.000.000,00	-	-	-	-	-
12	Rapat Kerja PUG dan Jejaring	Meningkatkan kualitas anggota pokja PUG dan Jejaring	Kab. Bengkulu	55 orang	150.000.000,00	Rapat Kerja PUG dan Jejaring	Meningkatkan kualitas anggota pokja PUG dan Jejaring	Kab. Bengkulu	50 Orang	116.127.219,00
13	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah Pengurus dan Anggota Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Masyarakat se Kabupaten Bengkulu yang terlatih	Kab. Bengkulu	1 Dokumen	700.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Jumlah Pengurus dan Anggota Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Masyarakat se Kabupaten Bengkulu yang terlatih	Kab. Bengkulu	4 Organisasi	308.361.400,00
14	Pemanfaatan dan Penilaian Kecamatan Sayang Ibu se Kabupaten Bengkulu	Meningkatnya kualitas ibu - ibu melalui percepatan penurunan angka kematian ibu yang dilaksanakan bersama sama masyarakat se Kabupaten Bengkulu	Kab. Bengkulu	250 orang	250.000.000,00	-	-	-	-	-
15	Perempuan Berpolitik	Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam politik	Kab. Bengkulu	50 orang	150.000.000,00	Perempuan Berpolitik	Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam politik	Kab. Bengkulu	40 Orang	90.597.000,00
16	Peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga	Jumlah perempuan organisasi yang mengikuti peringatan hari ibu	Kab. Bengkulu	100 orang	300.000.000,00	Peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga	Jumlah perempuan organisasi yang mengikuti peringatan hari ibu	Kab. Bengkulu	100 orang	216.799.000,00
17	Seminar Kepemimpinan Perempuan Kabupaten Bengkulu	Peningkatan kualitas SDM perempuan untuk menjadi pemimpin	Kab. Bengkulu	40 orang	150.000.000,00	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					Rp 17.526.096.106,00	-	-	-	-	Rp 14.567.388.068,00



2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Bengkalis dibahas dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan awal Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang pada tingkat kecamatan. Pada saat pelaksanaan musrenbang tersebut tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis dirumuskan tujuan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
- b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus



Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

3. Meningkatkan penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
4. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui peran Masyarakat dan Keluarga
5. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan PUG dalam Pembangunan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk anak dalam kondisi khusus
6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Perempuan di Pedesaan
7. Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Kualitas Informasi dan Konseling kesehatan Reproduksi Bagi Remaja serta Peningkatan Koordinasi Organisasi Perempuan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender



6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.



18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel .3.1

Tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2020 DPPPA

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). • Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender • Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. 	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
		b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil 	



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. • Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. • Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
3	Meningkatkan	a. Meningkatnya	• Menyusun, mereview,	Pemenuhan hak anak



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus</p>	<p>implementasi kabupaten/kota layak anak</p>	<p>mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. 	<p>dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.</p>
		<p>b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. • Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah 	<p>Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			lainnya. • Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.	
		c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	• Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor – Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rumusan Program program dan kegiatan tahun 2021 disusun dengan mengacu pada evaluasi capaian kinerja tahun 2019. Selain itu hasil capaian Indikator kinerja tersebut telah selaras dengan indikator kinerja yang tertuang dalam Rensra DPPPA 2016-2021 . baik sebagai indikator utama maupun pendukung. Dalam penyusunan program dan kegiatan DPPPA berpedoman pada arah dan kebijakan nasional yang terdapat pada Rensra Kementerian /Lembaga terkait baik tujuan , sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi prioritas nasional .



3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta tujuan dan sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2021 sebanyak 2 urusan 9 program dan 69 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.23.509.321.615,-



BAB . IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Non urusan

Mencakup 5 (lima) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pembangunan Daerah

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mencakup 4 (empat) program yaitu:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4. Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Untuk lebih lengkapnya program dan kegiatan kebutuhan dana (pagu indikatif) yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebagaimana terlampir.



කටයුතු	මුදල් ප්‍රමාණය	මුදල් ප්‍රමාණය	මුදල් ප්‍රමාණය	මුදල් ප්‍රමාණය	මුදල් ප්‍රමාණය	මුදල් ප්‍රමාණය	මුදල් ප්‍රමාණය	මුදල් ප්‍රමාණය	මුදල් ප්‍රමාණය
සමස්ත මුදල්	465.000.000,00								576.900.000,00
සමස්ත මුදල්	424.200.000,00								447.358.000,00
සමස්ත මුදල්	251.199.000,00								266.400.000,00
සමස්ත මුදල්	758.744.400,00								863.723.560,00
සමස්ත මුදල්	1.049.726.394,00								1.300.837.244,00



BAB V

PENUTUP

Rencana kerja tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 terus diupayakan untuk mendorong meningkatnya pemahaman pengarusutamaan gender sebagai tolok ukur keberhasilan Pembangunan Nasional dan dalam rangka diseminasi HAM dan Produk Hukum untuk mendorong kesejahteraan masyarakat antara lain:

1. Mendorong komitmen Pemerintah Daerah menerapkan perencanaan yang berperspektif gender yang menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan nasional untuk mengurangi kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan yang adil antara perempuan maupun laki-laki. PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sedangkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan alat untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan.
2. Mendorong komitmen Pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang responsif terhadap hak anak melalui penyelenggaraan pemenuhan hak anak yaitu hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak tumbuh kembang dan hak perlindungan khusus anak dilakukan lebih intensif, berkesinambungan dan bersinergi bersama SKPD.
3. Mendorong meningkatnya komitmen dan implementasi berbagai pola-pola pemberdayaan yang dilakukan oleh Lintas sektor dan SKPD yang terutama bagi perempuan dan kelompok rentan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan



4. Mendorong meningkatnya dukungan/kebijakan politis dan peningkatan komitmen semua pihak sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang memerlukan dukungan perangkat, sistem dan produk kebijakan (peraturan daerah/peraturan bupati) serta anggaran dapat terlaksana dan bersinergi dengan keberhasilan program pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis.

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Agustus 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**

Drs. H. RAJA ARLINGGA

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199303 1 226